TABLOID
SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 14 - 20 Mei 2025
No. 4086
Tahun LV



8 Terjun ke Pertanian, Bijak Saat Belajar di Medsos

9 Cerita Abimayu dan Awalludin jadi Brigade Pangan

10 Farahdibha, Suara Ibu Pertiwi di Panggung Dunia



KOPDES MERAH PUTIH: SOLUSI MASALAH DESA

FDK An Agricultural Company
BoomFlower®
BOOMBASTIS



Akselerator Tanaman
- Mempercepat penyerapan unsur hara,
- Mempercepat adaptasi dan pemulihan tanaman,
- Mempercepat pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan tanaman.

EDITORIAL

Jalan Panjang **Koperasi**

Pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada harapan besar di pundak koperasi tersebut, terutama dalam menggerakkan ekonomi desa.

Melihat perjalanan lembaga koperasi di Indonesia, sebenarnya telah diperkenalkan sebelum Indonesia merdeka. Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 yang mulai membangun dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang.

Melihat penderitaan tersebut Patih R. Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri. Ia mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit untuk membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang memberikan bunga yang tinggi terhadap pinjaman.

Setelah Indonesia Merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Salah tokoh Koperasi Indonesia adalah Moh. Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama itu kini dikenal sebagai Bapak Koperasi. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi.

Moh. Hatta mengusulkan didirikan 3 jenis koperasi. Pertama, koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Kemudian pada Orde Baru, Presiden Soeharto membangun Koperasi Unit Desa (KUD) untuk membantu petani dan nelayan. Namun dalam perjalanan, banyak KUD yang tersandung kasus. Bahkan mencuat istilah KUD dengan kepanjangan Ketua Untung Duluan. Sejak itu banyak yang antipati terhadap lembaga tersebut.

Di tengah kesan miring lembaga koperasi, Presiden Prabowo Subianto mencuatkan wacana pembentukan sekitar 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Rencana tersebut disampaikan langsung dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/3). Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ini dirancang sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

Melalui Kopdes, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Saat Peringatan Hari Koperasi yang jatuh pada 12 Juli 2025, program tersebut akan diluncurkan.

Optimistis pemerintah membangun Koperasi Desa Merah Putih perlu dibuktikan kembali. Persoalannya memang tak semudah membalikkan telapak tangan.

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Selamat **HUT Bulog**

Sektor ketahanan pangan nasional kembali mencatatkan pencapaian luar biasa. Bertepatan dengan HUT Bulog ke-58, hingga 10 Mei 2025, Perum Bulog telah menyerap 2.023.063 ton beras dari petani lokal. Angka tersebut tertinggi dalam sejarah serapan Januari–Mei selama 58 tahun berdirinya Bulog. Hal ini tentu menjadi kabar baik dan kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena itu, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bulog.

Pencapaian ini menandai keberhasilan kebijakan pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi bukti nyata peningkatan kesejahteraan petani dan langkah nyata menuju swasembada pangan. Capaian ini sebagai "tonggak bersejarah" dalam perjalanan penyerapan beras nasional.

Biasanya serapan sebesar ini tercapai dalam setahun penuh. Tapi kini, dalam waktu kurang dari lima bulan, kita berhasil melampauinya. Ini lompatan eksponensial. Apalagi capaian tersebut sepenuhnya berasal dari hasil panen petani lokal, tanpa impor beras medium sejak awal tahun. Ini murni produksi dalam negeri. Publik perlu tahu bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras petani dan kebijakan yang tepat sasaran.

Bahkan, serapan pada April 2025 saja mencapai 1,06 juta ton—angka bulanan tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Kini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog telah menembus 3,6 juta ton dan masih terus bertambah.

Keberhasilan ini tak lepas dari strategi penyerapan agresif oleh Bulog, sesuai arahan Presiden. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg, naik dari HPP 2024 yang hanya Rp6.000/kg. Harga ini memberi nilai wajar bagi petani, meningkatkan pendapatan, dan memacu produksi.

Bulog juga mengerahkan Tim Jemput Gabah yang bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Babinsa, serta kelompok tani hingga Gapoktan. Penggilingan padi dari skala kecil hingga besar pun dilibatkan untuk mempercepat pengadaan. Kami pastikan Bulog terus menyerap hingga kapasitas maksimal. Bahkan, kapasitas gudang telah ditambah 1,1 juta ton dan sedang dibangun 25 ribu gudang improvisasi.

Melimpahnya produksi beras nasional membawa tantangan tersendiri: gudang nyaris penuh. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan gudang darurat berumur 5–10 tahun, serta persiapan gudang permanen di setiap desa. Ini komitmen nyata agar seluruh hasil panen petani terserap.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 18,76 juta ton hingga Juni 2025. Sementara itu, laporan USDA memperkirakan produksi Indonesia tahun ini menembus 34,6 juta ton, menjadikan Indonesia produsen beras terbesar di ASEAN.

Dengan serapan lebih dari 2 juta ton, saya optimistis stok beras nasional bisa menembus 4 juta ton pada akhir Mei 2025. Angka ini belum pernah terjadi. Ini kemenangan petani Indonesia. Bahkan keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga siap menjadi pemain utama dalam ketahanan pangan global.

SAUNG TANI



Presiden instruksikan dirikan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih
- Harapan pemerintah: jadi penggerak ekonomi desa

Serapan gabah lancar, stok beras Bulog melimpah
- Harapan konsumen: harga beras tidak naik

Petani bersiap tanam padi kembali pada musim gadu
- Harapan petani: pupuk lancar

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Istimewa

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto;
Redaktur Pelaksana : Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi;
Koresponden : Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat);
Layoutman : Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Investasi pada Penyuluh dan Petani, Kunci Utama **Swasembada Pangan**

Bergerak dari sawah, para penyuluh menjadi ujung tombak swasembada dengan menggerakkan petani dengan ilmu, semangat, dan solusi nyata demi ketahanan pangan bangsa.



Agincourt Resources

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian swasembada pangan, tetapi justru akan memperluas dan memperkuat strategi pembangunan pertanian nasional.

Melalui program cetak sawah, distribusi pupuk, peningkatan akses teknologi, hingga penyediaan sarana produksi lainnya, pemerintah menargetkan lahirnya sistem pertanian yang lebih tangguh dan mandiri.

Dalam kerangka besar ini, peran penyuluh pertanian menjadi sangat vital, bukan hanya sebagai penyambung kebijakan, tetapi sebagai agen perubahan di akar rumput, yang berhadapan langsung dengan petani dalam upaya merombak cara pandang dan cara kerja mereka.

Penyuluh pertanian hari ini tidak lagi cukup hanya menyampaikan teknologi baru atau jadwal tanam. Mereka adalah fasilitator pengetahuan, motivator di tengah masyarakat tani, sekaligus penggerak pembangunan pertanian berbasis lokalitas.

Dalam dunia pertanian yang makin kompleks akibat perubahan iklim, dinamika pasar, hingga tekanan lahan, penyuluh hadir sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan praktik pertanian di tingkat tapak.

Penyuluhan pertanian dikatakan berhasil apabila mampu mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani. Dari petani yang pasif menjadi petani yang adaptif, inovatif, dan mandiri dalam mengambil keputusan. Perubahan ini bukan pekerjaan mudah.

Diperlukan pendekatan partisipatif yang menempatkan petani sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Karena itu, penyuluh harus membekali diri dengan pengetahuan terkini, kemampuan komunikasi yang baik, serta integritas moral yang tinggi agar menjadi teladan di tengah masyarakat.

Dalam konteks pembangunan swasembada pangan, kesinergian antara penyuluh dan petani merupakan hal mutlak. Program penyuluhan harus disusun berbasis kebutuhan nyata petani di lapangan dan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Artinya, penyuluh harus memiliki kapasitas analisis wilayah dan pemetaan potensi lokal. Misalnya, potensi lahan tadah hujan di satu wilayah membutuhkan strategi berbeda dibandingkan dengan daerah dengan infrastruktur irigasi lengkap.

Di sinilah pentingnya keterpaduan antara sektor pertanian dengan sektor lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum untuk pengembangan irigasi, atau Kementerian BUMN dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Gerakan penyuluhan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan regulasi, anggaran, dan kelembagaan yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Pemerintah harus memastikan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mendapatkan fasilitas yang memadai, mulai dari pelatihan berkala, sarana transportasi, hingga sistem insentif yang adil.

Sebab, hampir seluruh aktivitas PPL berada di lapangan—menyusuri sawah, berdiskusi di posko tani, hingga mendampingi petani mengelola lahan secara langsung. Tanpa dukungan memadai, potensi mereka akan terhambat.

Instruksi Presiden dan Menteri Pertanian untuk percepatan swasembada pangan pada 2025 menuntut kerja kolaboratif yang tidak biasa. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian perlu ditopang dengan ketersediaan air yang cukup, infrastruktur yang layak, serta kepastian akses petani terhadap pupuk dan benih.

Dalam hal ini, penyuluh kembali berada di garis depan—menjadi penghubung antara kebutuhan petani dan respons kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan menjadi hal penting yang kerap terabaikan. Tanpa mekanisme monitoring yang jelas, sulit menilai apakah pendekatan yang dilakukan selama ini efektif.

Maka, perlu adanya sistem pelaporan yang transparan, serta pelibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menilai kinerja penyuluhan secara berkala.

Target swasembada pangan 2025 bukan sekadar ambisi politik, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan negara.

Oleh karena itu, investasi terbesar harus diberikan kepada manusia—dalam hal ini para penyuluh dan petani—sebagai pelaku utama perubahan. Tanpa mereka, teknologi akan sia-sia, dan program sebaik apapun tidak akan menyentuh akar persoalan.

Kini saatnya menempatkan penyuluh sebagai pilar utama dalam pembangunan pertanian. Dengan dukungan yang tepat, gerakan penyuluh dapat menjadi kekuatan penggerak yang tidak hanya mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga mengantarkan petani Indonesia menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penulis: Hasan Latuconsina
Penyuluh Pertanian Pusat

CATATAN Begawan



Penelitian di Malaysia, Singapura dan Indonesia

Kali ini saya meringkasan berita perkembangan penelitian di Indonesia, Singapura dan Malaysia yang dikutip dari CNN. Malaysia dan Singapura sudah mengambil langkah langkah dalam bidang penelitian yang sesuai dengan perkembangan masa depan.

Fokus riset di Indonesia dari laman publikasi Kementerian riset dikti ada delapan bidang fokus riset utama, yaitu: pangan, energi terbarukan, kesehatan (termasuk pengembangan obat), transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, dan sosial humaniora, pendidikan, seni, dan budaya.

Sedangkan Malaysia, memilih langsung fokus pada sektor kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, inovasi digital, dan teknologi semikonduktor, sejalan dengan ambisinya membangun ekonomi digital dan berbasis inovasi pada tahun 2025.

Kemudian Singapura memilih terus mempertahankan daya kompetitifnya dalam riset dasar. Meski ada berbagai bidang yang dipilih, fokus Singapura ada pada manufaktur dan rekayasa tingkat lanjut (advanced) dengan tujuan mengembangkan teknologi manufaktur mutakhir untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya secara global.

Dua negara ini juga patut dicontoh dalam diversifikasi sumber pendanaan risetnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah. Malaysia kini mendapatkan sekitar 40% dana riset dari sektor swasta dan bertekad memaksa industri terus menaikkan anggaran penelitian hingga 70% dalam 5 tahun ke depan. Sementara Singapura sudah mencapai 60% saat ini melebihi anggaran riset dari pemerintah.

Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata angka dana riset swasta baru mencapai sekitar 20%, yang meski nampak kecil sebenarnya justru menjadi peluang untuk terus digenjot di tengah keterbatasan APBN.

Seperti dikutip dari tabloidsinartani.com, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono saat berkunjung ke Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Penyegar dan Industri (BRMPTRI) di Parungkuda, Sukabumi, Jumat (9/5) mengakui, produksi tanaman perkebunan di Indonesia saat ini masih banyak ketinggalan dari negeri lain.

Meski secara riset, Indonesia lebih unggul dari negara lain, tapi di tingkat petani produktivitasnya masih rendah. Untuk itu, kita harus didukung kebijakan atau political will pemerintah. Apalagi Presiden ingin komoditas perkebunan menjadi posisi top nomor satu dunia.

Sumber : CNN/Sinartani

KOPDES MERAH PUTIH: SOLUSI MASALAH DESA



Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025. Kehadirannya dirancang sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

Peluncuran Kopdes Merah Putih rencananya akan berlangsung pada 12 Juli 2025 mendatang bertepatan dengan Hari Koperasi. Saat itu diharapkan sudah ada 80 ribu Kopdes Merah Putih. Karena itu menjelang peresmian, pemerintah terus melakukan percepatan pembentukan.

"Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih," kata Presiden Prabowo dalam Inpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kemensesneg.

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2025 setidaknya ada 18 kementerian/ lembaga pemerintah dan pemda yang mendapatkan tugas masing-masing. Mereka adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Menteri Koperasi (Menkop), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pertanian (Mentan).

Selain itu, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta para kepala daerah.

Tiga Skenario

Presiden memberikan instruksi khusus kepada jajaran terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Kepada Menko Pangan diinstruksikan untuk sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih. Menko Pangan juga diperintahkan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah membuat tiga skenario pendirian Kopdes Merah Putih ini yakni mengoptimalkan koperasi yang sudah ada, membangun baru dan merevitalisasi koperasi yang sudah tidak berjalan.

Sedangkan perintah yang diberikan kepada Menteri Koperasi diantaranya, menyusun bisnis model Kopdes Merah Putih; menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan; memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan SDM perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Kopdes Merah Putih; serta melakukan *monitoring* dan evaluasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Pengentasan Kemiskinan

Menteri Koperasi Budi Arie berharap pembentukan Kopdes Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pedesaan. Karena itu, fokus utama program ini adalah sektor pertanian dan buruh tani.

Selain itu, pembentukan koperasi desa juga diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di desa-desa. Apalagi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan hampir 40 persen masyarakat miskin di Indonesia bekerja sebagai buruh tani, dengan mayoritas tinggal di wilayah pedesaan.

Budi Arie menegaskan koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa. Diharapkan Kopdes Merah Putih ini dapat memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa.

"Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan," katanya.

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2025 juga tertuang mengenai pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih. Pendanaan akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan menyalurkan pembiayaan dari Bank Himbara, dengan pinjaman hingga Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa, termasuk kendaraan truk dan bengkelnya.

Instruksi juga diberikan kepada para gubernur dan bupati. Diantaranya, mendorong dan memfasilitasi pembentukan, serta sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing dalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Kopdes Merah Putih.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju. Melalui program ini, pemerintah berharap desa dapat tumbuh mandiri dan berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Yul**

Mekanisme Membangun **Kopdes Merah Putih**

Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Surat tertanggal 18 Maret 2025 merupakan tindaklanjut dari Inprs No. 9 Tahun 2025. Bagaimana mekanisme pembentukan Kopdes merah Putih?



Surat Edaran tersebut ditujukan ke para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah terkait; Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Desa Seluruh Indonesia. Surat Edaran ini menjadi acuan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Seperti diketahui dalam forum Retret Kepala Daerah, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kekompakan pusat-daerah dan penguatan ekonomi di desa, termasuk peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Arahan ini dipertegas dalam rapat terbatas dengan menetapkan target pembentukan 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

Dalam SE Menteri Koperasi tersebut, sosialisasi pembentukan Kopdes Merah Putih sudah dimulai Maret lalu. Nantinya setiap desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi.

Dalam forum ini akan disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal seperti nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dan lain-lain, serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi. ”Hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi,” kata Budi Ari.

Setelah terbentuk koperasi, Budi Ari menjelaskan, selanjutnya dilakukan pengesahan badan hukum, khususnya untuk pendirian koperasi baru. Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diajukan kepada notaris pembuat alcta koperasi.

”Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum,” tutur Budi Ari.

Langkah selanjutnya, pendataan dan integrasi koperasi eksisting. Bagi desa yang telah memiliki koperasi aktif dilakukan pendataan dan penilaian kinerja. Jika dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih. Jika sudah ada koperasi desa, namun kurang aktif atau lemah, maka akan langsung masuk ke skema revitalisasi.

Tiga Model Koperasi

Dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dilakukan dengan tiga model pendekatan didahului dengan musyawarah desa dan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk, Kemenko Pangan, Silvi Sumanti mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pendirian Kopdes Merah Putih yakni, koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada dan revitalisasi koperasi yang selama ini tidak berjalan.

Pertama, pembentukan koperasi baru. Dilaksanakan di desa yang belum memiliki koperasi. Model ini membentuk koperasi dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa.

Meski pemerintah telah mengatur pendirian koperasi primer dapat dilakukan sembilan orang. Namun dalam SE Menteri Koperasi ini, khusus pembentukan Kopdes Merah Putih pendirian harus menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa.

Kedua, pengembangan koperasi yang sudah ada. Desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik, koperasi yang sudah eksisting tersebut ditingkatkan kapasitasnya dan cakupan usahanya diperluas.

Ketiga, revitalisasi koperasi. Hal ini dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada, namun tidak aktif/lemah. Revitdisasi koperasi lemah ini melalui restrukturisasi manajemen dan atau kemungkinan penggabungan (merger) dengan koperasi lain jika diperlukan.

”Untuk pendirian koperasi nantinya perlu adanya musyawarah desa, kemudian ditentukan pengurus, anggota dan kegiatan usahanya. Setelah itu dibuat berita acara yang selanjutnya dilaporkan ke pemerintah,” ujar Silvi

Dalam SE Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025, pemilihan pengurus koperasi berdasarkan hasil dari rapat musyawarah masyarakat desa. Untuk Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa sebagai ex-officio Pengawas Koperasi. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda atau ada pertalian keluarga karena hubungan perkawinan.

Bagaimana peran penyuluh? Silvi mengatakan, penyuluh menjadi pendamping kepala desa dalam musyawarah desa. Bahkan penyuluh dapat memberikan masukan terkait dengan usaha pertanian. Misalnya, menjelaskan potensi desa, peluang pasar, pengembangan usaha dan kebutuhan petani.

”Jadi peran penyuluh ikut mendorong, bahkan sebagai fasilitator dan motivator petani, serta memperluas kemitraan koperasi desa. Untuk itulah perlu adanya kerjasama dalam pendirian Kopdes Merah Putih,” kata Silvi saat Temu Usaha Koperasi Desa Merah Putih pada ajang Jambore Penyuluh Pertanian se Jawa Barat di Kuningan, Senin (28/4).

Koperasi Desa Merah Putih ke depan menjadi gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama. Koperasi ini bukan sekadar tempat simpan pinjam atau jual beli, tapi wadah pembangunan ekonomi yang dikelola langsung oleh dan untuk masyarakat desa. **Yul**

Penamaan dan Usaha Koperasi

Nama Koperasi Desa Merah Putih dengan format:

1. Diawali dengan kata “Koperasi”.
2. Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih.
3. Diakhiri dengan nama desa setempat.

Contoh: Koperasi Desa Merah Putih Karangrojo

Usaha Koperasi Desa Merah Putih

1. Gerai/ outlet penyediaan sembako;
2. Gerai/outlet penyediaan obat murah;
3. Penyediaan kantor koperasi;
4. Unit simpan pinjam koperasi;
5. Gerai/outlet klinik desa;
6. Penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
7. Logistik (distribusi);
8. Lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.

Pembentukan Kopdes Merah Putih, Dituntut Peran Penyuluh Pertanian



Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan menjadi kekuatan baru ekonomi di pedesaan. Pemerintah berencana akan meluncurkan sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Sejauh mana peran penyuluh dalam membangun koperasi tersebut?

Sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, peran penyuluh pertanian sangat vital. Apalagi pemerintahan Prabowo Subianto telah mengibarkan bendera tinggi-tinggi untuk mencapai swasembada pangan. Sebagai pendamping petani, peran penyuluh menjadi penting untuk mewujudkan cita-cita Presiden tersebut.

Salah satu kebijakannya adalah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 yang salah satu amanahnya menarik penyuluh pertanian yang ada di daerah ke pusat untuk memberdayakan penyuluh. Dengan adanya Inpres tersebut, peran penyuluh semakin diakui ditingkat nasional.

Sementara itu dengan lahirnya Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025, peran penyuluh akan samakin dituntut. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan, peran penyuluh pertanian sangat penting dalam menggerakkan ekonomi desa.

”Peran penyuluh sudah diakui dilevel nasional. Karena itu, diharapkan kelerlibatan penyuluh dan gabungan kelompok tani dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya saat Diskusi Penyuluh Pertanian, Satu Komando, Satu Tujuan digelaran Jambore Penyuluh Pertanian se Jawa Barat di Kuningan, Selasa (29/4).

Untuk itu, Idha meminta penyuluh pertanian saat ada musyawarah desa pembentukan Kopdes Merah Putih ikut memberikan masukan. Jadi selain usaha wajib yang sudah pemerintah tetapkan, koperasi tersebut mempunyai bisnis lainnya. ”Kalau nanti 80 ribu koperasi mempunyai jenis usaha yang sama, dikhawatirkan koperasi tersebut tidak bisa ’berlari’ ” katanya.

Karena desa identik dengan pertanian, Idha berharap, Kopdes Merah Putih juga mempunyai usaha terkait pertanian supaya lebih berdaya saing. Sebab, nantinya koperasi tersebut menjadi wadah atau kelembagaan di desa yang dapat menaungi petani dan kelompok tani. ”Kami sudah memberikan masukkan ke Kantor Menko Pangan agar Kopdes Merah Putih mempunyai *core business* lainnya,” ujarnya.

Idha mencontohkan, jika Kopdes Merah Putih mempunyai unit usaha pertanian, maka segala kebutuhan petani seperti pupuk dan benih bisa tersedia dengan mudah. Apalagi kemudian koperasi tersebut bisa menjadi penampung atau membeli hasil produksi petani (off taker), seperti gabah.

Dengan demikian, menurut Idha akan memangkas rantai pasok pemasaran produk pertanian yang selama ini cukup panjang. Petani akan mendapatkan harga yang baik dan konsumen juga menerima harga yang lebih murah. ”Jadi tolong penyuluh ikut mengawal pendirian Kopdes Merah Putih ini,” tegasnya.

Selama ini Idha mengakui, di lapangan ketergantungan petani terhadap tengkulak masih cukup tinggi. Misalnya, ada hutang saprodi, membantu biaya sekolah dan biaya lainnya. Jadi memang tidak mudah untuk memutus mata rantai tersebut. ”Tapi sedikit demi sedikit akan bisa berkurang,” harapnya.

Terlibat dalam Pengurus

Untuk mewadahi kepentingan petani, Idha juga menghimbau agar penyuluh dan pengurus poktan/gapoktan aktif menjadi pengurus Kopdes Merah Putih. Apalagi dalam regulasinya tidak ada larangan penyuluh dan pengurus poktan/gapoktan menjadi pengurus.

Idha berharap, nantinya Kopdes Merah Putih menjadi wadah melindungi petani, poktan dan gapoktan. “Jika penyuluh atau pengurus poktan/gapoktan menjadi pengurus Kopdes, kepentingan petani akan terwadahi. Jadi tolong penyuluh pertanian mengawal Kopdes Merah Putih ini menjadi wadah petani,” tuturnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Penyuluh Pertanian, Takdir Mulyadi juga berharap kepada penyuluh pertanian, sejalan dengan proses pengalihan penyuluh pertanian daerah ke pusat sesuai Inpres No. 3 tahun 2025, penyuluh tetap bekerja memberikan pendampingan kepada petani, termasuk dalam pendirian Kopdes Merah Putih.

“Peran penyuluh disini adalah pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitator kelompok tani dalam membentuk dan menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” katanya. Selain itu, lanjut Takdir, penyuluh pertanian mendorong koperasi petani atau gabungan kelompok tani bertransformasi menjadi Kopdes Merah Putih, tanpa menghilangkan keberdaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani itu sendiri.

Dengan demikian, proses bisnis di koperasi masih terkait dengan pertanian, selain ada usaha di bidang lain. Kopdes Merah Putih nantinya bisa menjadi offtaker hasil produksi petani dengan menyerap hasil panen petani seperti gabah sesuai ketetapan pemerintah. Bukan hanya itu, Kopdes juga dapat memangkas rantai pasokan yang selama ini membuat keuntungan petani sangat kecil.

Karena itu agar tidak terjadi ‘gesekan’ dalam pengembangan bisnis, Takdir meminta penyuluh pertanian masuk menjadi pengurus Kopdes Merah Putih. Penyuluh dapat menjelaskan proses bisnis apa yang harus dilakukan koperasi, seperti penyalur pupuk subsidi, penjualan benih dan meningkatkan pasar dengan menjalin kemitraan.

Dalam pembentukan Kopdes Merah Putih, Takdir melihat, peran kepala desa/lurah sangat penting. Nantinya saat pembentukan Kopdes akan ada Forum Musyawarah Desa yang akan dihadiri petani/poktan. “Disinilah peran penyuluh untuk menjelaskan proses bisnis apa yang bisa dilakukan Kopdes. Penyuluh bisa memberikan masukkan potensi desa, kendala dan solusinya,” ujarnya.

Takdir mencontohkan di Lampung, sudah ada Kopdes Merah Putih yang melakukan kontrak dengan Patra Niaga untuk menjadi pengecer BBM. Koperasi tersebut menyediakan BBM untuk kebutuhan alat mesin pertanian milik petani. “Selama ini petani kesulitan mendapatkan solar untuk bahan bakar alsintan,” katanya.

Data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, saat ini ada sekitar 755.542 kelompok tani dan 30 ribu gapoktan. Selain itu ada 14.300 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan sekitar 5.000 KEP yang sudah berbadan hukum koperasi. “Kelembagaan petani tersebut bisa didorong menjadi Kopdes Merah Putih,” kata Takdir. **Yul**

Semua Tentang Koperasi Desa Merah Putih



Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama. Koperasi ini bukan sekadar tempat simpan pinjam atau jual beli, tapi wadah pembangunan ekonomi yang dikelola langsung oleh dan untuk masyarakat desa. Dengan semangat kebersamaan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi solusi nyata bagi warga desa. Berikut semua tentang Koperasi Desa Merah Putih seperti dikutip dari koperasi.or.id.

Syarat Awal Pendirian

Sebelum membentuk koperasi, beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi

1. Anggota Pendiri Minimal 20 Orang: Warga desa yang bersedia menjadi anggota dan aktif dalam koperasi.
2. Identitas dan Domisili yang Jelas: Setiap calon anggota harus berdomisili tetap di desa dan memiliki KTP.
3. Kesepakatan Bersama Tujuan Koperasi: Harus ada pemahaman dan kesepakatan soal visi usaha koperasi, apakah fokus di simpan pinjam, distribusi kebutuhan pokok, hasil tani, atau lainnya.
4. Dukungan Sosial dan Kelembagaan: Dukungan dari tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lembaga desa seperti BUMDes sangat membantu dalam proses awal pendirian.
5. Kesiapan Pengurus Sementara: Minimal sudah ada nama-nama yang siap menjadi pengurus awal dan panitia pembentukan koperasi.

Fasilitas dan Pendampingan

Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya memberikan panduan, tapi juga mendampingi langsung proses tumbuhnya koperasi di tiap desa. Setiap koperasi yang tergabung akan mendapat berbagai fasilitas dan dukungan agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

1. **Template Dokumen Lengkap:** disediakan semua dokumen standar yang dibutuhkan untuk mendirikan koperasi, mulai dari AD/ART, format berita acara musyawarah, sampai contoh proposal usaha koperasi.
2. **Pelatihan Pengurus dan Anggota:** Tim pendamping akan memberikan pelatihan dasar manajemen koperasi, pengelolaan keuangan, hingga teknik pemasaran produk desa. Pelatihan bisa dilakukan secara langsung maupun daring.
3. **Sistem Operasional Digital (Opsional):** Bagi koperasi yang siap go digital, disediakan sistem manajemen koperasi berbasis aplikasi. Fitur meliputi: pencatatan simpan pinjam, laporan keuangan, dan pengelolaan anggota secara online.
4. **Branding dan Dokumentasi Koperasi:** Kami bantu menyiapkan identitas koperasi mulai dari desain logo, papan nama, spanduk, hingga media promosi yang bisa digunakan untuk memperkenalkan koperasi kepada warga desa maupun mitra luar.
5. **Akses ke Jaringan Pemasok dan Pasar:** Koperasi akan dihubungkan dengan jaringan mitra terpercaya untuk pengadaan barang pokok, alat pertanian, hingga pemasaran produk lokal desa ke pasar yang lebih luas.
6. **Pendampingan Berkelanjutan:** Tidak hanya pendampingan di awal, tapi terus membantu koperasi agar tetap berjalan dan berkembang. Pendampingan bisa berupa konsultasi rutin, kunjungan lapangan, hingga penguatan kelembagaan.

Langkah Mendirikan Koperasi

Mendirikan Koperasi Merah Putih di desa bukanlah hal yang rumit. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, setiap desa bisa segera memiliki koperasi yang dikelola secara mandiri dan profesional.

1. **Musyawarah Warga Desa:** Langkah pertama adalah mengadakan musyawarah yang melibatkan warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dalam musyawarah ini akan dibahas tujuan pendirian koperasi, jenis usaha koperasi yang akan dijalankan, pembentukan panitia pendiri dan pemilihan nama koperasi dan calon pengurus sementara

2. **Penyusunan Dokumen Legalitas**
   Setelah ada kesepakatan bersama, panitia menyusun dokumen penting seperti:
   - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
   - Daftar nama anggota pendiri
   - Susunan pengurus dan pengawas
   - Berita acara musyawarah

   Semua dokumen ini akan menjadi dasar pendirian koperasi secara hukum.

3. **Pengesahan Akta Notaris**
   Dokumen yang telah disusun dibawa ke notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi. Notaris akan membantu menyiapkan dokumen sesuai format yang disyaratkan oleh pemerintah.

4. **Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)**
   Setelah akta jadi, pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Jika semua persyaratan lengkap dan disetujui, koperasi akan mendapat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan status badan hukum resmi.

5. **Pendaftaran sebagai Mitra Koperasi Merah Putih**
   Koperasi yang telah sah bisa mendaftar ke program Koperasi Desa Merah Putih untuk mendapatkan:
   - Akses ke pelatihan dan pendampingan
   - Sistem operasional digital (jika diinginkan)
   - Branding koperasi
   - Jaringan mitra dan pasar nasional

Terjun ke Pertanian, Bijak Saat Belajar di Medsos

Sosial media kini menjadi salah satu yang masyarakat gunakan untuk mencari informasi, tak terkecuali soal pertanian. Sayangnya, banyak sumber informasi dari media sosial tersebut, tingkat kebenaran dipertanyakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.



Ketika ekonomi tengah dilanda keguncangan, sektor pertanian menjadi salah satu penopang pertumbuhan pertanian. Pada triwulan I tahun 2025 pertumbuhan sektor sebesar 10,52 persen (year-on-year), sehingga mendorong sektor pertanian menjadi lapangan usaha. Angka ini melampaui pertumbuhan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan industri pengolahan.

Daya tarik pertanian menjadi ladang usaha kini banyak diminati berbagai kalangan. Jika dulu, para kalangan pensiun yang tertarik berusaha di bidang pertanian, maka kini banyak generasi muda yang juga mulai melirik. Pertumbuhan minat berusaha di pertanian, kemudian diikuti dengan maraknya informasi mengenai pertanian, dari mulai budidaya, pengolahan hingga pemasaran melalui media sosial (medsos) yang turut berkembang.

Perkembangan pesat media digital, termasuk medsos, menjadi salah satu dampak saat dunia dilanda pendemi Covid. Berbagai aplikasi mengenai pertanian juga bertumbuh seiring dengan perkembangan medsos. Informasi pertanian di medsos pun tumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka berusaha mencari follower (pengikut) untuk mendapatkan cuan dari subscriber.

Sayangnya, informasi yang ada di medsos tak selamanya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada yang sudah menaruhkan modal, seperti membeli berbagai peralatan pertanian, ternyata saat dipraktekkan, hasilnya zonk. Parahnya, ada yang menebar informasi melalui medsos youtube kadang tak masuk akal.

Menyebarnya informasi pertanian di medsos menjadi keresahan tersendiri bagi Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Ia pun mengingatkan kepada masyarakat, pelaku usaha dan generasi muda yang ingin menekuni dunia usaha pertanian, baik budidaya dan pengolahan tidak mudah tergiur dengan informasi yang ada di medsos, seperti Tiktok maupun Youtube.

Pasalnya, informasi tersebut tidak berasal dari hasil riset dan kaidah akademik tidak terpenuhi. Akibatnya, banyak kasus pelaku usaha yang sudah menanamkan modal untuk usaha, ternyata hasil gagal.

"Jangan sampai pelaku usaha, generasi muda yang ingin berusaha di dunia pertanian, tapi modalnya hanya tiktok dan sosmed seperti Youtube. Banyak informasi di media sosial tidak berdasarkan dengan riset dan academic competitive tidak terpenuhi," kata Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono saat berkunjung ke Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Industri dan Penyegar (BRMPTRI) di Parungkuda, Sukabumi, Jumat (9/5).

Untuk membantu pelaku usaha yang ingin terjun ke dunia pertanian, pihaknya berusaha mendekatkan hasil penelitian ke masyarakat. "Pekerjaan rumah kita adalah mengatasi gap antara hasil riset dengan penerapan di lapangan. Banyak anak muda belajar dari media sosial tanpa data ilmiah. Kita ingin mendekatkan riset dengan dunia usaha, sehingga anak-anak muda bisa meniru model bisnis budidaya atau pengolahan berbasis riset," ujarnya.

Jembatani Hasil Riset

Mas Dar juga turut menyoroti pentingnya menjembatani hasil riset pertanian dengan kebutuhan praktis dunia usaha dan agribisnis, khususnya di kalangan anak muda. Karena itu, Kementerian Pertanian menggandeng perguruan tinggi negeri, seperti IPB University membuat model untuk menjadi pegangan bagi pelaku usaha.

Langkah ini katanya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengadopsi teknologi terbaik dalam memperkuat sektor pertanian nasional. "Nanti kita buat modelling pengolahan dan budidaya pertanian yang bisa dicontoh dan diaplikasikan ke masyarakat," kata Mas Dar.

Setelah berkunjung ke BRMPTRI dan balai penelitian lainnya, Wamentan mengakui, ternyata Indonesia mempunyai banyak balai penelitian yang jumlahnya mencapai 64 UPT. Ada balai penelitian, balai pengolahan, balai pasca panen hingga inseminasi ternak. "Artinya, fasilitas yang kita punya cukup banyak dan semuanya keren-keren," ujarnya.

Bahkan ia mengakui, SDM yang berada di balai-balai tersebut, cukup terlatih dan berpendidikan tinggi. Namun menurutnya, pekerjaan rumah (PR) nya adalah bagaimana hasil penelitian tersebut dapat diaplikasi di dunia usaha. "Ini yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita lihat hasil penelitian kita sudah keren-keren, ada kelapa, cokelat, biomasa. Bagaimana semua itu dibungkus dalam modul juklak dan juknis dan nantinya masyarakat tinggal mengikuti," tuturnya.

Untuk menyampaikan ke masyarakat, Mas Dar mengatakan, pemerintah mempunyai penyuluh pertanian dan berbagai fasilitas dari pemerintah. Jadi, kini tinggal bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar. Sekali lagi, jangan mudah tergiur dan percaya dengan informasi dari media sosial.

Kepala BRMPTRI, Evi Savitri Iriani menjelaskan, balai yang ia pimpin berperan dalam pengembangan benih unggul dan teknologi pengolahan hasil perkebunan. BRMPTRI saat ini memiliki berbagai varietas tanaman perkebunan. Diantaranya, kopi ada 10 varietas robusta, 1 arabika dan 2 liberika, serta ada juga kopi binturong. Selain itu juga varietas kakao, lada dan kelapa. "Kami juga mempunyai hasil penelitian biodisel yang sudah dilakukan ujicoba," ujarnya.

Semua teknologi ini diharapkan bisa langsung diimplementasikan masyarakat yang akan terjun menekuni dunia pertanian. "Kami berharap masyarakat tahu bahwa balai-balai Kementan adalah sumber teknologi. Mereka bisa bertanya, belajar, dan menerapkan langsung di lapangan. Jangan hanya berhenti di jurnal atau laporan, tapi betul-betul dirasakan manfaatnya," tutur Evi. **Yul**

Cerita Abimayu dan Awalludin jadi **Brigade Pangan**



Kisah generasi muda yang berhasil terjun ke dunia pertanian menjadi contoh bagi yang lain untuk tak lagi sungkan menekuni usaha pertanian. Apalagi kini pemerintah melalui Kementerian Pertanian memfasilitasi anak-anak muda untuk menjadi bagian dari Brigade Pangan.



Seperti kisah Abimayu yang berawal dari rasa tidak tertarik pada dunia pertanian. Namun, setelah bergabung dengan program petani milenial, pandangannya berubah total. Kini, ia membuktikan bahwa bertani dengan dukungan mekanisasi dan teknologi mampu memberikan hasil yang menjanjikan.

"Awalnya saya nggak tertarik jadi petani, tapi sejak bergabung di program Petani Milenial tahun 2023, saya merasa tertantang. Kini hasil sementara yang kami dapatkan sekitar Rp 24 jutaan dari luas lahan setengah hektar lebih," ungkap Abimayu, petani milenial asal Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Akhirnya Abimayu mengakui, prospek pertanian modern ke depan sangat menjanjikan, terutama dengan dukungan mekanisasi seperti yang kini dijalankan petani muda di wilayahnya. Ia mencontohkan pengelolaan lahan yang selama ini secara manual, kini dapat dikerjakan jauh lebih cepat dan efisien berkat penggunaan alsintan.

Dalam satu kali kerja, Abimayu mengungkapkan, alsintan seperti traktor bisa menggarap hingga lima hektar lahan. Dengan biaya jasa pengolahan lahan mencapai Rp800 ribu/ha, seorang operator alsintan bisa menghasilkan hingga Rp4 juta dalam sehari. "Jumlah tersebut belum termasuk keuntungan dari efisiensi waktu dan tenaga, itu masih dari sisi operator saja," ujarnya.

Abimayu mengakui, dalam penggunaan alsintan memang ada kebutuhan tambahan seperti perawatan alat, bahan bakar, dan operasional lainnya. Namun ia tetap optimistis pada prospek pertanian modern. Terlebih, bantuan dan dukungan dari Kementerian Pertanian baik dalam bentuk alat maupun pembinaan menjadi motivasi besar bagi petani muda seperti dirinya untuk terus berinovasi.

"Bantuan pemerintah bukan hanya mendorong kami lebih produktif, tapi juga jadi semangat untuk menjadikan pertanian sebagai kekuatan utama ketahanan pangan di Kalimantan Timur," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Abimayu mengungkapkan bahwa kini mereka tak lagi menjual hasil panen ke tengkulak, melainkan langsung ke Bulog, yang memberikan harga lebih stabil dan adil bagi petani. "Bagusnya sekarang juga itu kami tidak lagi menjual ke Tengkulak. Langsung ke Bulog. Jadi tidak ada lagi yang namanya mafia- mafia tengkulak," ungkapnya.

Abimayu juga menyampaikan ajakan penuh semangat kepada generasi muda di seluruh Indonesia untuk mau terjun ke sektor pertanian. Menurutnya, sektor pertanian yang kini ditekuninya bukan seperti pertanian di zaman dulu. Sebaliknya pertanian zaman ini sangat menguntungkan dan menjadi pusat perhatian berbagai pihak sehingga kebijakan - kebijakan pemerintah sangat menguntungkan petani.

"Saya disini mengajak buat kawan-kawan untuk mau bertani. Karena menjadi petani itu tidaklah memalukan dan dari hasil pertanian kita bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan lain, bertani yang kita anggap kecil tapi itu hasilnya sangat besar," kata Abimayu.

Kisah dari Jambi

Selain Abimayu, petani milenial asal Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kisah sukses Brigade Pangan juga dirasakan Awalludin Fajar (31), pemuda asal Desa Simpang Datuk, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Sebagai Ketua Brigade Simpang Datuk 3, Awalludin memimpin 15 anggota yang secara kolektif mengelola lahan seluas 205,09 ha. Dengan sistem kerja berbasis kelompok dan dukungan dari pemerintah, mereka berhasil membuktikan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang menjanjikan secara ekonomi.

"Berdasarkan analisis musim tanam terakhir, anggota Brigade kami yang terlibat dalam budidaya bisa menghasilkan rata-rata Rp20 juta per bulan," kata Awalludin. Tak hanya dari budidaya, pendapatan juga diperoleh melalui peran sebagai operator alsintan seperti combine harvester. Dalam waktu 20 hari masa panen, operator dapat meraup penghasilan hingga Rp20 juta, sementara helper memperoleh sekitar Rp6 juta.

Brigade Pangan di Simpang Datuk juga mencatat peningkatan produktivitas yang signifikan. Jika sebelumnya hasil panen hanya berkisar 3,2-4 ton/ha, maka kini meningkat menjadi 5–6 ton/ha. Peningkatan ini berkat pendampingan teknis, pola tanam yang lebih efisien, dan dukungan alat pertanian modern.

Kementan telah menyalurkan berbagai bantuan alsintan kepada Brigade ini, mulai dari combine harvester, traktor roda empat dan dua, pompa air, hingga rotavator, yang semuanya mendorong efisiensi kerja dan peningkatan hasil panen. Modernisasi pertanian yang digagas melalui program Brigade Pangan turut mengubah persepsi generasi muda terhadap profesi petani.

Kini, bertani dipandang sebagai usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Apalagi kini pemerintah menjaga harga gabah di petani dengan harga Rp 6.500/kg. "Harga gabah juga semakin stabil. Bulog membeli dengan harga sesuai HPP yaitu Rp6.500/kg, jadi pendapatan kami lebih terjamin," jelas Awalludin.

Keberhasilan Awalludin dan rekan-rekannya mencerminkan efektivitas Program Brigade Pangan sebagai bagian dari strategi akselerasi swasembada pangan nasional. Sekaligus upaya konkret dalam meregenerasi petani di tengah tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan global.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi capaian luar biasa petani milenial yang sukses mengelola pertanian modern dan meraup pendapatan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Amran mengatakan, Brigade Pangan akan terus diperkuat sebagai garda terdepan modernisasi pertanian.

Program ini dirancang untuk mendorong pertanian berbasis bisnis dan teknologi yang dikelola oleh generasi muda. "Brigade Pangan akan menjadi motor penggerak yang terampil, profesional, dan berorientasi bisnis. Ini adalah investasi untuk masa depan pertanian Indonesia," tegasnya. **Yul**



Farahdibha, Suara Ibu Pertiwi di Panggung Dunia



Suara perempuan Indonesia kembali menggema di panggung dunia. Farahdibha Tenrilemba, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wanita Tani Indonesia HKTI, tampil meyakinkan sebagai pembicara dalam Forum Asia-Pacific Economic Cooperation Policy Partnership on Women and the Economy (APEC PPWE) 2025 yang digelar di Jeju, Korea Selatan.

Dalam forum prestisius ini, Farahdibha yang juga pemerhati pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif membagikan pengalaman dan strategi Indonesia dalam memberdayakan perempuan, khususnya generasi muda, dalam pembangunan ekonomi kawasan.

Dalam sesi bertajuk "The Role of Young Women in Driving Economic Development," Farahdibha menyoroti peran vital perempuan muda dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia memaparkan sejumlah inisiatif dari Indonesia yang telah berhasil meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kewirausahaan pemuda pedesaan, hingga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi lokal.

"Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kemandirian individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas," ujar Farahdibha.

Ia juga menekankan peran penting organisasi perempuan dalam mendukung ekonomi berbasis komunitas, mulai dari pelatihan kepemimpinan hingga pendampingan usaha yang menjangkau perempuan di akar rumput.

Tak hanya itu, Farahdibha turut berkontribusi dalam dua sesi strategis lainnya, yakni "Women's Health and Its Impact on Economic Growth" dan "Care Economy and Work-life Balance in the Context of Low Fertility and Aging Populations".

Dengan pengalamannya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Care Economy dari W20 — forum perempuan dalam G20 2024. ia menegaskan perlunya investasi pada infrastruktur layanan perawatan, perlindungan maternitas, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

"Forum seperti APEC PPWE membuka ruang kolaborasi lintas sektor dan negara untuk memperkuat komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang inklusif. Saya juga mengajak sektor swasta untuk ikut serta menciptakan lingkungan kerja yang ramah perempuan, termasuk melalui skema cuti melahirkan yang progresif," ungkapnya.

Farahdibha menegaskan, keterlibatan aktif perempuan muda dalam UMKM dan ekonomi lokal adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Sebagai informasi, APEC PPWE merupakan forum kerja sama regional di bawah naungan APEC yang berfokus pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Suara Indonesia di India

Sebelumnya Farahdibha dipercaya tampil menjadi salah satu pembicara dalam Digital Empowerment Summit 2025 di New Delhi, India.

Di forum bergengsi yang mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan jejaring negara-negara G20 itu, Farahdibha membawa isu yang selama ini sering luput dari perhatian.

Mulai dari pentingnya sistem keuangan yang benar-benar inklusif dan berpihak pada perempuan, terutama mereka yang hidup di wilayah pedesaan.

Sebagai Senior Expert dalam Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Farahdibha berbicara berdasarkan pengalaman nyata di lapangan.

Ia menceritakan perjuangan para perempuan desa yang harus membagi waktu antara mengolah lahan pertanian, mengurus keluarga, dan membesarkan anak-anak, sambil menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

"Mereka memiliki semangat, kemampuan, dan daya tahan luar biasa. Namun sistem yang ada belum cukup dirancang untuk mendukung mereka," ungkap Farahdibha di hadapan peserta forum dalam sesi Global South Dialogue on Financial Inclusion.

Lebih dari sekadar menggugah kesadaran, Farahdibha membagikan berbagai inisiatif konkret yang sedang berjalan di Indonesia.

Ia menyoroti peran kelompok tani dan kelompok wanita tani yang memperkuat ekonomi berbasis komunitas, program pembiayaan tanpa agunan seperti Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta pemanfaatan teknologi digital yang membuka akses pelaku usaha mikro perempuan ke pasar yang lebih luas.

Ia juga menyinggung langkah besar pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan nasional dengan target ambisius yakni, 90 persen inklusi keuangan pada 2024, dengan prinsip kesetaraan gender sebagai fondasinya.

Indonesia, kata Farahdibha, kini berada di posisi strategis untuk membentuk masa depan kerja sama ekonomi Global South, seiring dengan status barunya sebagai anggota BRICS.

Menurutnya, masa depan keuangan digital akan bergantung pada seberapa besar perempuan dilibatkan, baik dalam perancangan maupun dalam implementasi kebijakan.

"Inklusi keuangan bukan sekadar fasilitas tambahan. Ini adalah hak dasar yang harus dijamin untuk semua warga negara, terutama mereka yang selama ini tidak terdengar," tegasnya.

Farahdibha juga menyampaikan apresiasinya kepada para penggagas dan penyelenggara forum. Sapiens Research, Rimjhim Gour, dan The Future Shift Labs, yang telah membuka ruang bagi suara negara-negara berkembang untuk ikut membentuk agenda global.

Tampil di forum internasional ini, Farahdibha menunjukkan bahwa perempuan Indonesia bukan hanya berbicara soal perubahan, mereka adalah bagian dari perubahan itu sendiri. **Herman/Yul**

Perempuan dalam Dunia Pertanian





Peran sentral perempuan dalam sektor pertanian saat ini sangat penting namun tidak tampak. Kontribusi signifikan perempuan tani sering kali tertutupi dominasi laki-laki dalam forum-forum pengambilan keputusan. Akibatnya, tak jarang program-program pemerintah di bidang pertanian menunjukkan bias gender.

Prof Anna Fatchiya, dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University mengatakan, selama ini, perencanaan dan pelaksanaan sampai evaluasi program pembangunan lebih melibatkan laki-laki, sehingga kebutuhan dan masalah yang dihadapi perempuan kurang terakomodasi.

"Istilah seperti 'buta gender' atau 'tidak responsif gender' muncul untuk menggambarkan kondisi ini, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat," kata Guru Besar Penyuluhan Gender IPB University seperti dikutip dari laman IPB University.

Secara garis besar, peran perempuan dalam rumah tangga petani terbagi menjadi tiga. Pertama, peran reproduksi (perawatan dan pekerjaan domestik). Kedua, peran produksi (terlibat dalam seluruh siklus usaha tani, pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan). Ketiga, serta peran sosial (aktif dalam kelompok tani, koperasi desa, posyandu, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya).

Prof Anna juga menyoroti, isu perempuan petani yang menjadi kepala rumah tangga juga sering terabaikan. Kelompok tani cenderung didominasi oleh kepala rumah tangga laki-laki, padahal banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Penelitian menunjukkan penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak pembangunan di pedesaan belum sepenuhnya responsif gender. Misalnya, hanya mengundang petani laki-laki dan pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki. Padahal, perempuan seharusnya memiliki akses informasi dan sumber daya lain, berpartisipasi, dan turut mengontrol yang sama dalam program-program pembangunan, serta mendapatkan manfaat yang adil.

Perubahan Iklim

Dalam konteks perubahan iklim, peran perempuan menjadi semakin vital. Prof Anna menegaskan, program-program untuk meningkatkan adaptasi dan resiliensi petani atas dampak perubahan iklim akan gagal jika tidak melibatkan perempuan.

Sebagai contoh, keputusan terkait perubahan pengelolaan usaha tani seperti penentuan pembelian bibit yang tahan dari dampak perubahan iklim, penggunaan modal usaha, dan lain-lain umumnya berada di tangan istri, sehingga keterlibatan mereka dalam penyuluhan menjadi sangat penting.

"Perempuan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kegagalan panen dan kesulitan ekonomi keluarga. Bukan sekali dua kali mereka menjadi yang terakhir dalam menikmati sumber daya keluarga," tegasnya.

Di sisi lain, Prof Anna mengatakan, kondisi ketidaksetaraan gender dan pandangan negatif terhadap kemampuan kepemimpinan juga kerap menghambat partisipasi dan suara perempuan. Karena itu, pemberdayaan perempuan dan pengakuan atas kontribusi mereka yang tidak terlihat menjadi sangat penting dalam pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender menurut Prof. Anna, sebenarnya telah mengamanatkan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah harus memperhatikan potensi, masalah, kebutuhan, dan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap tahapannya. Tujuan akhirnya adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender. "Akan tetapi, implementasinya di berbagai sektor belum optimal," ujarnya.

Ia membandingkan program penyuluhan pertanian yang didanai oleh lembaga internasional, pemerintah pusat, dan program rutin. Hasilnya, program yang didanai dari luar negeri cenderung lebih memperhatikan keterlibatan perempuan melalui unsur afirmasi. Sementara program nasional belum secara eksplisit mencantumkan hal tersebut. Lebih lagi, banyak program rutin tidak mempertimbangkan kondisi perempuan, misalnya dalam penjadwalan kegiatan penyuluhan.

Prof Anna menyoroti aspek inovasi dan teknologi bagi perempuan tani. Ia menuturkan, teknologi pertanian yang dihasilkan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perempuan. Contohnya, alat penyemprot hama penyakit tanaman sawit terlalu berat sehingga tidak sesuai untuk pekerja perempuan yang dominan bekerja di perkebunan.

"Inovasi yang responsif gender, baik dari segi ergonomi maupun kemudahan penggunaan bagi laki-laki dan perempuan, menjadi sangat penting," katanya. Peran perempuan dalam dunia pertanian memang tak bisa diabaikan begitu saja. **Yul**

5 Kunci Tingkatkan Responsivitas Gender

Untuk meningkatkan responsivitas gender dalam kebijakan dan program pembangunan, terutama di sektor pertanian, Prof Anna menyarankan beberapa langkah kunci.

1. Komitmen kuat dari para pemimpin di semua tingkatan pemerintahan dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan.
2. Pengumpulan dan analisis data terpilah gender yang akurat untuk mengidentifikasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (aparatur pemerintah dan pihak terkait) dalam pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender, termasuk keseimbangan representasi gender dalam tim penyuluh.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender, yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua.
5. Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang memastikan alokasi dana mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas laki-laki maupun perempuan. ***Sumber IPB.ac.id***

Penyuluh Pertanian dan Keberhasilan **Koperasi Desa Merah Putih**

Oleh: **Warsana, SP.M.Si.,MP**
Penyuluh Pertanian Ahli Utama di BRMP Jawa Tengah

Ketika pemerintah mencanangkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga pertengahan 2025, yang terlintas dalam benak sebagian besar orang mungkin adalah soal anggaran besar, infrastruktur desa, dan kebijakan tingkat pusat. Namun, satu aspek krusial yang sering luput dari sorotan adalah peran penyuluh pertanian. Di balik semangat membangun ekonomi kerakyatan dari desa, ada sekelompok orang yang bekerja dalam senyap, namun memegang peran yang sangat vital: mereka adalah para penyuluh pertanian.

Program Kopdes Merah Putih memiliki misi mulia—mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan rentenir, menyediakan akses keuangan yang aman, serta mendekatkan berbagai layanan ekonomi dan sosial langsung ke masyarakat desa. Namun ide sebesar apa pun akan tetap menjadi wacana jika tidak dikawal oleh orang-orang yang memahami realitas di lapangan. Di sinilah letak pentingnya penyuluh. Mereka bukan sekadar aparatur teknis yang mengajarkan cara menanam atau merawat tanaman, tetapi telah menjelma menjadi katalisator transformasi sosial dan ekonomi di perdesaan.

Dengan kedekatan personal yang telah dibangun bertahun-tahun bersama petani, penyuluh menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan penerapannya di tingkat paling dasar. Saat pemerintah menyusun Surat Edaran, merancang instruksi presiden, dan menetapkan dasar hukum pembentukan koperasi, para penyuluh sudah lebih dulu tahu siapa petani yang tertarik bergabung, siapa yang ragu, dan siapa yang akan menolak karena trauma masa lalu terhadap koperasi yang gagal. Ketika musyawarah desa digelar untuk memutuskan pembentukan koperasi, penyuluh hadir tidak hanya sebagai saksi, tapi sebagai penggerak: membangun kepercayaan, menyederhanakan konsep yang rumit, dan memastikan suara petani terdengar dan dihargai.

Lebih dari itu, penyuluh juga memainkan peran teknis yang tidak kalah penting. Mereka memandu integrasi kelompok tani dengan koperasi, memastikan bahwa hasil panen yang sebelumnya dijual murah di musim panen bisa disimpan di gudang milik koperasi. Mereka mengajarkan cara memanfaatkan cold storage, mendorong diversifikasi usaha tani, dan memperkenalkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal. Koperasi Merah Putih, pada akhirnya, tidak akan menjadi lembaga mati penuh formalitas, karena ada penyuluh yang merawatnya dengan pendekatan praktis dan manusiawi.

Namun, yang tak kalah penting adalah peran penyuluh sebagai penjaga integritas program. Dalam dunia ideal, koperasi berjalan sesuai AD/ART, pengurus bekerja jujur, dan dana digunakan tepat sasaran. Tapi di dunia nyata, tak sedikit penyimpangan bisa terjadi—mulai dari pengelolaan dana yang tidak transparan hingga koperasi yang hanya hidup di atas kertas. Penyuluh berperan sebagai pengawas sosial, yang mampu mengangkat persoalan dari lapangan ke meja dinas, bahkan kementerian, dengan catatan dan bukti yang jelas. Mereka adalah mata dan telinga yang bisa melihat dinamika nyata, serta mulut yang berani bersuara demi perbaikan.

Tentu saja, tanggung jawab sebesar ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada para penyuluh tanpa dukungan sistemik. Jika penyuluh diharapkan menjadi motor utama keberhasilan koperasi, maka negara pun harus menyediakan bahan bakar yang layak: pelatihan rutin, insentif yang memadai, alat kerja modern, dan penghargaan yang setimpal. Tidak bisa kita berharap hasil luar biasa dari para penyuluh jika mereka terus bekerja dalam keterbatasan.

Penting juga untuk melihat program ini sebagai peluang mengangkat kembali martabat penyuluh di tengah masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, posisi penyuluh sering kali dianggap kelas dua dalam sistem birokrasi pertanian. Padahal, tanpa penyuluh yang aktif dan kredibel, tidak ada modernisasi pertanian yang bisa berjalan mulus. Koperasi Merah Putih bisa menjadi momentum kebangkitan peran penyuluh sebagai garda depan pembangunan desa yang sejati.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan hanya soal terbangunnya gudang, apotek, atau klinik desa. Keberhasilan sejati akan diukur dari seberapa besar koperasi ini mampu mengubah hidup petani dan pelaku UMKM desa menjadi lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya. Dan itu hanya bisa dicapai jika ada pendamping setia yang bekerja dari awal hingga akhir: para penyuluh pertanian. Mereka bukan hanya bagian dari strategi, tetapi nyawa dari implementasi. Karena itu, jika kita ingin Koperasi Merah Putih berdiri kokoh sebagai pilar ekonomi desa, maka kita harus memastikan penyuluh pertanian berdiri teguh di garis depan perjuangan ini.



Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Koperasi Bukan Sekadar Wadah, **Tapi Gerakan**

Di desa-desa petani kita bekerja keras setiap hari, namun hasil tak selalu sebanding dengan jerih payahnya. Koperasi Merah Putih digadang-gadang jadi solusi, bukan koperasi yang hanya papan nama—melainkan koperasi yang hidup, dijalankan petani sendiri, dan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

Koperasi petani adalah organisasi ekonomi yang dibangun dari, oleh, dan untuk petani. Tujuannya bukan semata-mata mencari untung, melainkan menciptakan kesejahteraan bersama. Koperasi bisa menyediakan sarana produksi, memasarkan hasil panen, menjadi tempat simpan pinjam, bahkan ruang belajar. Ada nilai yang harus dihidupi dan dipupuk, yaitu kejujuran, kerja sama, kemandirian, dan tanggung jawab. Koperasi sejati adalah perwujudan gotong royong dalam bentuk institusi ekonomi modern.

Koperasi di Indonesia sering mengalami kesulitan berkembang, padahal menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Kuncinya adalah faktor struktural, budaya, dan kebijakan. Budaya gotong royong memang kuat secara tradisional, tapi dalam praktik ekonomi sering tidak berlanjut secara institusional. Banyak koperasi dibentuk bukan dari inisiatif anggota sendiri. Individualisme ekonomi cukup dominan—anggota sering lebih fokus pada manfaat pribadi, bukan keberhasilan kolektif.

Harus ada budaya kerja kolektif dan tanggung jawab bersama yang kuat. Koperasi tumbuh dari bawah ke atas didasari kebutuhan nyata masyarakat. Anggota koperasi harus patuh terhadap tata kelola, aktif berpartisipasi, dan loyal terhadap koperasinya.

Koperasi dikelola oleh tenaga profesional dengan sistem audit ketat. Oleh karena itu perlu pelatihan rutin bagi pengurus dan anggota. Setiap koperasi wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada anggotanya. Bantuan modal tanpa disertai pembinaan yang kuat, akan membuat koperasi mengalami ketergantungan dan tidak mandiri.

Banyak koperasi kita semangat di awal, tapi mati perlahan karena tidak transparan, tidak ada pendidikan keanggotaan, dan terlalu bergantung pada bantuan luar. Diperlukan gerakan koperasi Merah Putih agar semangat koperasi dibangun, rapat anggota rutin digunakan sebagai wadah pengambilan keputusan, pencatatan keuangan tertib dan terbuka untuk anggota, usaha koperasi relevan dengan kebutuhan lokal, pendidikan koperasi untuk anggota, agar semua paham hak dan tanggungjawabnya. Koperasi adalah milik bersama. Jika pengelola jalan sendiri tanpa anggota, cepat atau lambat akan bubar.

Teknologi untuk Koperasi Merah Putih dimungkinkan sehingga digitalisasi, transparansi pun meningkat. Anggota bisa cek laporan, transaksi, hingga stok barang dari ponsel mereka.

Koperasi bukan tujuan akhir, melainkan alat menuju kehidupan petani yang lebih adil dan bermartabat. Maka koperasi harus terus dikawal, didampingi, dan diberdayakan. Bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh kita semua yang percaya bahwa petani harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek pasar.

Sistem koperasi membentuk ekosistem lengkap—mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga pembiayaan. Banyak anggota pasif dan hanya terlibat saat butuh pinjaman atau bantuan. Koperasi harus dilihat sebagai “alat bantu sementara”, bukan identitas jangka panjang.

Harga Beras Dunia Anjlok ke Titik Terendah



Harga beras dunia anjlok tajam ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dipicu melimpahnya pasokan dari India, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Kondisi ini mengguncang eksportir besar seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja yang mengandalkan pasar tradisional, termasuk Indonesia.

Di tengah tekanan global ini, Indonesia justru mencetak tonggak Sejarah dengan mencatatkan rekor produksi tertinggi dan berhasil keluar dari ketergantungan impor beras konsumsi. Indonesia bahkan disebut mencetak rekor produksi tertinggi se-ASEAN.

Berdasarkan Rice Outlook edisi April 2025 dari USDA, Indonesia menunjukkan performa luar biasa. Produksi beras Indonesia pada musim 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton beras giling, tertinggi di ASEAN. Bahkan, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di kawasan, melampaui Vietnam dan Thailand.

FAO juga mencatat produksi beras global 2024/2025 mencapai rekor tertinggi sebesar 543,6 juta ton. Jika ditambah stok sebelumnya, total pasokan global menembus 743 juta ton, jauh di atas kebutuhan konsumsi dunia yang berada di angka 539,4 juta ton.

India sendiri mencatatkan stok beras dan gabah pemerintah sebanyak 63,09 juta ton per 1 April 2025, lima kali lipat dari target 13,6 juta ton. India diprediksi meningkatkan ekspor sebesar 25%, mencapai 22,5 juta ton pada 2025. Ini membuat India menguasai lebih dari 40% pangsa ekspor global, melampaui gabungan ekspor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Amerika Serikat.



Tekanan Berat Produsen

Saat ini sejumlah negara eksportir, terutama Thailand dan Vietnam dikabarkan sedang ketar-ketir karena harga beras dunia sedang anjlok. Penurunan harga global dimulai sejak India mencabut larangan ekspor gandum pada 2022.

Langkah ini disusul dengan peningkatan tajam produksi dan ekspor beras, sehingga menekan harga beras ekspor India ke titik terendah dalam 22 bulan. Harga beras di Thailand pun jatuh ke level terendah dalam tiga tahun, sementara Vietnam mengalami harga terendah dalam hampir lima tahun.

Menurut laporan Reuters, harga beras global kini telah turun sepertiga dibandingkan puncaknya pada 2024. Presiden Asosiasi Eksportir Beras India, BV Krishna Rao, menyebut bahwa harga 5% broken rice diperkirakan bertahan di kisaran US$390 per ton hingga akhir tahun karena membanjirnya pasokan.

Thailand yang selama ini menjadi eksportir andalan kawasan, kini mengalami tekanan hebat. Harga beras India yang murah membuat ekspor Thailand pada kuartal I 2025 anjlok hingga 30%, menjadi hanya 2,1 juta ton. Sepanjang 2025, ekspor diperkirakan turun 24% menjadi 7,5 juta ton.

Bahkan penurunan harga gabah domestik sebesar 30% pada Februari 2025 memicu gelombang protes dari petani Thailand. Pemerintah setempat berupaya mengatasi gejolak ini dengan mengusulkan kerja sama bersama India dan Vietnam untuk menstabilkan harga dan melindungi petani lokal.

Begitu juga dengan Vietnam yang sebelumnya sukses mengekspor 8 juta ton beras pada 2023, kini juga menghadapi tekanan akibat membanjirnya beras murah India dan hilangnya pasar Indonesia. Ekspor Vietnam diprediksi turun 17% menjadi 7,5 juta ton pada 2025.

Dalam Forum Ekonomi Beras ASEAN di Hanoi pada Maret 2025 lalu, Menteri Pertanian Vietnam Le Minh Hoan menyatakan Vietnam tengah berupaya memperluas pasar ekspor ke Timur Tengah dan Afrika, serta mendorong ekspor beras premium untuk bertahan di tengah persaingan harga yang ketat.

Hal serupa terjadi di Kamboja. Dalam pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, 5 Mei 2025, Presiden Senat Kamboja Hun Sen menyatakan bahwa Kamboja kini kehilangan pasar penting karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Hun Sen mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam ketahanan pangan, namun menegaskan bahwa lonjakan produksi domestik Indonesia berdampak pada pasar regional. Kamboja kini berusaha mencari pasar baru ke Eropa dan Asia Timur untuk menyerap kelebihan stok beras, meskipun harus bersaing dengan harga murah dari India dan Vietnam.

Bagaimana Indonesia?

Berbanding terbalik dengan negara eksportir yang kini menghadapi tantangan besar, Indonesia justru sedang di atas angin. Cadangan beras pemerintah menembus angka 3,5 juta ton per Mei 2025, tertinggi dalam 57 tahun terakhir, seluruhnya berasal dari produksi lokal tanpa tambahan impor beras medium.

Bulog berperan penting dalam menyerap produksi petani. Hingga Mei 2025, Bulog telah menyerap 1,8 juta ton beras dari petani, menjadi penyangga utama ketahanan pangan nasional. Produksi dalam negeri kini telah melampaui kebutuhan nasional, sehingga Indonesia tidak lagi melakukan impor beras konsumsi pada 2025. Impor hanya dilakukan secara terbatas untuk keperluan khusus seperti hotel, restoran, dan kafe.

"Alhamdulillah, hari ini kita buktikan bahwa Indonesia bisa kuat stok berasnya. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kedaulatan dan martabat bangsa," tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia menambahkan, keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga dukungan penuh dari Presiden RI Prabowo Subianto. "Kami bergerak cepat dengan strategi pompanisasi, mekanisasi, dan penyediaan benih unggul. Hasilnya nyata: kita tidak lagi impor beras konsumsi dan stok kita tertinggi dalam sejarah," katanya.

Sebagai catatan, Indonesia sebelumnya merupakan pengimpor beras terbesar kelima dunia pada 2023, dengan total impor 3,06 juta ton. Mayoritas diimpor dari Thailand (1,38 juta ton atau 45,12%) dan Vietnam (1,15 juta ton atau 37,47%).

Anjloknya harga beras dunia menjadi peringatan keras bagi eksportir seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja untuk segera beradaptasi dengan dinamika pasar. Di sisi lain, ini adalah momen emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara mandiri pangan dan bahkan bersiap menjadi eksportir di masa depan.

Namun, pemerintah tetap harus mewaspadai tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim, penurunan luas lahan pertanian, dan fluktuasi pasar global. Penguatan teknologi pertanian, pengelolaan air, dan infrastruktur distribusi menjadi kunci mempertahankan pencapaian ini. "Ke depan, kami akan perkuat lagi petani kita agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan tidak mungkin, Indonesia jadi pengekspor beras," ujar Mentan Amran optimistis.

Yul

Waspadai Fenomena **Menurunnya Populasi Kupu-kupu**



Fenomena penurunan populasi kupu-kupu menjadi perhatian serius. Dari salah satu studi, dalam dua dekade terakhir (2000-2020), Amerika telah kehilangan 22 persen populasi kupu-kupu. Fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan berkurangnya ketersediaan tanaman pakan serta inang.

Prof Noor Farikhah Haneda, Guru Besar IPB University Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan menjelaskan, sensitivitas kupu-kupu terhadap perubahan lingkungan bervariasi antarjenis. Ada kupu-kupu yang sangat rentan terhadap polusi, ada pula yang mampu bertahan di lingkungan yang tercemar.

"Penurunan populasi ini berkorelasi erat dengan kualitas lingkungan, terutama ketersediaan food plant (tanaman pakan) dan host plant (tanaman inang) bagi serangga bersayap indah ini," ujar pakar bidang entomologi hutan ini seperti dikutip dari laman IPB University.



Prof Noor membandingkan populasi kupu-kupu di area dengan tingkat polusi berbeda, serta di perbatasan hutan dan pemukiman. Penurunan kualitas habitat secara keseluruhan berkontribusi signifikan terhadap penurunan populasi kupu-kupu, di mana beberapa spesies mampu beradaptasi sementara yang lain tidak.

"Kupu-kupu cenderung menjadikan hutan sebagai habitat utama. Namun, mereka juga mencari makan dan beraktivitas di area terbuka yang terpapar sinar matahari, termasuk pemukiman," jelasnya.

Berkurangnya populasi kupu-kupu menurut Prof. Noor memiliki dampak nyata terhadap ekosistem. Ini menyangkut jaring-jaring makanan dan proses polinasi. Semakin sedikit kupu-kupu, semakin berkurang pula produk yang dihasilkan dari penyerbukan tanaman. "Faktor-faktor seperti penurunan kualitas udara, lingkungan, ketersediaan makanan, dan hilangnya habitat menjadi penyebab utama tren penurunan ini," tegasnya.

Karena itu, Prof Noor menekankan pentingnya menyediakan pakan bagi kupu-kupu, salah satunya dengan menanam tanaman berbunga. Sebagai solusi jangka pendek, penyediaan cairan madu di area tertentu bisa dilakukan. Seperti yang ada di Kampus IPB Dramaga, yakni di sekitar Fakultas Pertanian (Faperta) dan Graha Widya Wisuda (GWW). "Solusi jangka panjangnya adalah menanam tanaman-tanaman yang berbunga sebagai sumber nektar bagi kupu-kupu," ujarnya.

Pembangunan atau Pelestarian Alam?

Prof. Noor mengakui, selama ini, ada dilema antara pembangunan dan pelestarian alam. Keberadaan polusi seiring dengan perkembangan pembangunan adalah hal yang tak terhindarkan. "Polusi pasti ada seiring dengan pembangunan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan upaya penyediaan ruang terbuka hijau dan penanaman tanaman yang menjadi pakan kupu-kupu," tegasnya.

Pemerintah menurutnya, telah menetapkan regulasi yang mewajibkan penyediaan persentase tertentu ruang terbuka hijau (RTH), termasuk di kawasan industri dan pabrik. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) minimal harus mencapai 30 persen dari total luas wilayah kota. Dari jumlah tersebut, 20 persen harus berupa RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu, keberadaan hutan kota juga diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa luas hutan kota minimal harus mencakup 10 persen dari luas wilayah kota sebagai bagian dari RTH.

Namun demikian, sebut Prof Noor, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pengawasan terhadap regulasi ini. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap kawasan industri mematuhi ketentuan ini.

Langkah ini dinilainya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan habitat serta sumber makanan bagi serangga seperti kupu-kupu di tengah pesatnya pembangunan. "Perlunya kebijakan yang bijak dan terintegrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi menjaga keanekaragaman hayati, termasuk keberlangsungan hidup kupu-kupu," harap Prof Noor.

Yul

Ada 5.000 Species Kupu-kupu di Indonesia

Kupu-kupu di Indonesia memiliki keaneragaman hayati yang terbilang paling tinggi. Jumlah species kupu-kupu di Indonesia yang dapat dikenali sedikitnya sebanyak 2.000 spesies pada tahun 2020. Namun, diperkirakan jumlah spesies kupu-kupu di Indonesia mencapai 4.000–5.000 spesies.

Seperti dikutip dari *wikipedia,* kupu-kupu di Indonesia terbagi menjadi 10 famili. Spesies kupu-kupu di Indonesia paling banyak termasuk dalam famili Nymphalidae. Sedangkan famili kupu-kupu dengan spesies paling sedikit adalah famili Rionidae.

Penyebaran spesies kupu-kupu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pola penyebaran kupu-kupu di Indonesia terbagi dua, yaitu yang berasal dari benua Asia dan benua Australia. Kondisi iklim tropis di Indonesia menjadi pendukung keberlangsungan habitat kupu-kupu. Kupu-kupu di Indonesia memiliki siklus hidup antara 5–10 pekan. Periode terbang kupu-kupu di Indonesia berbeda saat musim hujan dan kemarau.

Seperdua dari jumlah spesies kupu-kupu di Indonesia hanya terdapat di suatu wilayah tertentu. Habitat kupu-kupu di Indonesia berpusat di taman-taman nasional, seperti taman wisata alam, dan kawasan hutan lindung yang ada di Indonesia.

Sejak tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan status konservasi pada 19 spesies kupu-kupu di Indonesia. Tujuannya untuk mencegah kelangkaan dan kepunahan spesies kupu-kupu di Indonesia akibat deforestasi dan perburuan kupu-kupu. Hampir semua spesies kupu-kupu yang dilindungi di Indonesia berasal dari famili Papilionidae. **Yul**

Dengan Brigade Pangan, Harapan Swasembada Muncul dari Aceh Timur

Dengan Brigade Pangan Makmur Bersama, petani Aceh Timur, dipimpin Rizki Safuan, berhasil meng-optimalkan teknologi modern, meningkatkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada.



Program Brigade Pangan yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan) terus membuahkan hasil nyata di lapangan. Salah satu kisah sukses datang dari Gampong Kabu, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur, melalui kelompok Brigade Pangan Makmur Bersama yang dikelola Rizki Safuan.

Beranggotakan 15 orang, kelompok tani ini mengelola lahan seluas 202 hektare dengan indeks pertanaman (IP) 200. Melalui penerapan teknologi pertanian modern seperti traktor roda dua dan empat, transplanter, serta combine harvester, mereka berhasil meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.

"Teknologi seperti transplanter sangat membantu percepatan tanam dan efisiensi tenaga kerja. Kami jadi bisa menggarap lahan lebih cepat, sehingga luas tambah tanam (LTT) pun meningkat," ujar Rizki, selaku manajer Brigade Pangan Makmur Bersama.

Program Brigade Pangan memang dirancang untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kementan mendorong pemanfaatan alsintan (alat dan mesin pertanian) serta budidaya padi sebagai komoditas utama. Di Aceh Timur, upaya ini diterjemahkan menjadi aksi kolektif yang memberikan dampak ekonomi dan sosial.

Kelompok Makmur Bersama tidak hanya fokus pada produksi padi, tetapi juga menyediakan jasa olah lahan dan pascapanen untuk petani sekitar. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi di lapangan, tapi juga memberi peluang kerja baru bagi warga desa.

Dalam satu musim tanam terakhir, kelompok ini berhasil membukukan pendapatan tambahan sebesar Rp98.693.000. Sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa teknologi pertanian mampu meningkatkan pendapatan petani secara langsung.

"Seluruh anggota mendapatkan pekerjaan tetap dan penghasilan tambahan. Dampaknya positif dan merata. Teknologi tepat guna yang disediakan pemerintah kami manfaatkan sebaik-baiknya," tambah Rizki.

Kisah sukses ini menjadi bukti bahwa investasi di sektor pertanian, khususnya pada penyuluh, petani, dan teknologi, mampu menghasilkan perubahan nyata. Kementan pun terus mendorong pembentukan Brigade Pangan di berbagai wilayah Indonesia.

"Gerakan ini harus terus digelorakan. Kita harus melangkah bersama, memperkuat ketahanan pangan dari desa-desa," tutup Rizki.

Brigade Pangan Makmur Bersama telah membuktikan bahwa dengan semangat kerja keras dan kolaborasi, ketahanan pangan bukan sekadar slogan, tetapi cita-cita yang bisa diraih bersama. **Nattasya/Gsh**



Laris Manis Berkat Simodis®

Panen meningkat, Petani Senyum Manis!



Simodis® 100DC
PLINAZOLIN® technology

syngenta.

INOVATIF
Jago lawan ulat hingga tuntas.

UNGGUL
Tanaman kokoh dan hijau.

BERKUALITAS
Panen melimpah dan berkualitas.

IPB Kenalkan Empat Varietas Padi Baru

IPB University kembali memperkenalkan varietas unggul padi baru. Varietas padi tersebut akan menambah pilihan bagi petani. Selain produktivitasnya lebih tinggi, keunggulan lainnya adalah tahan terhadap hama dan penyakit tanaman.



Peneliti sekaligus dosen IPB University dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Prof Hajrial Aswidinnoor dan Dr Willy Bayuardi Suwarno kembali melepas empat varietas terbaru padi sawah IPB. Ke-empat varietas yang diperkenalkan IPB University kepada masyarakat adalah varietas padi sawah IPB 12S, IPB 13S, IPB 14S, dan IPB 15S.

Sebelumnya IPB juga telah memperkenalkan varietas padi seperti IPB 1R, IPB 3S, maupun IPB 9G yang kini sudah banyak dimanfaatkan masyarakat. Varietas yang dilepas kali ini merupakan varietas padi IPB yang ke-15, dan merupakan inovasi varietas ke-10, 11, 12, dan ke-13.

"Seperti inovasi varietas padi sebelumnya, varietas yang diperkenalkan kali ini adalah juga varietas Padi Tipe Baru (PTB) yang memiliki karakter malai yang lebih lebat dari umumnya malai varietas padi nasional yang ada," ujar Prof Hajrial, ketua tim peneliti saat acara Launching Inovasi IPB 2025 di Kampus Dramaga, Rabu (14/5).

Dari data pengujian pada 11 lokasi di berbagai kabupaten di Indonesia selama proses persiapan pelepasan varietas, keempat varietas memiliki produktivitas yang unggul dan berumur genjah.

Jika dilihat dari potensi dan rerata produktivitasnya, varietas IPB 12S memiliki potensi hasil 11,78 ton/ha dan rata-rata produksi 8,01 ton/ha; varietas IPB 13S mencapai 11,55 ton/ha dan 7,97 ton/ha; varietas IPB 14S mencapai 11,66 ton/ha dan 8,45 ton/ha; dan varietas IPB 15S memiliki potensi 10,16 ton/ha dan rata-rata produksi 8,14 ton/ha.

Keunggulan Varietas IPB

Prof Hajrial mengungkapkan, keempat varietas ini memiliki ketahanan yang baik terhadap hama wereng batang coklat (WBC) biotipe 1, 2, dan 3. Varietas IPB 12S dan IPB 13S bereaksi agak tahan terhadap semua ketiga biotipe hama WBC. Sementara varietas IPB 14S dan IPB 15S bereaksi agak tahan terhadap biotipe 1 dan 2.

Dari pengujian terhadap empat ras penyakit blas (ras 033, 133, 073, dan 173) di rumah kaca, keempat varietas juga menunjukkan reaksi ketahanan yang sangat unggul dibanding varietas padi sawah nasional yang ditanam luas oleh petani saat ini. Hasil pengujian menunjukkan keempat varietas padi IPB ini memiliki reaksi tahan dan agak tahan terhadap semua (empat) ras blas tersebut.

Sementara dua varietas padi sawah nasional yang juga diuji bersama-sama sebagai pembanding, keduanya bereaksi rentan terhadap keempat ras blas tersebut. "Tingkat ketahanan ini merupakan karakter yang sangat unggul jika dibandingkan dengan padi varietas nasional yang banyak dibudidayakan petani saat ini," kata Prof Hajrial.

Ketahanan yang baik terhadap penyakit blas ini diharapkan dapat membantu para petani yang mengalami serangan penyakit blas pada pertanaman sawahnya. Terlebih saat ini, sudah mulai banyak ditemukan pada lahan sawah irigasi di sebagian sentra produksi padi nasional.

Selain sifat-sifat unggul di atas, Prof Hajrial melanjutkan, masing-masing varietas juga memiliki karakter unggul kekhususan lain. Sebagai contoh, varietas IPB 12S dan IPB 13S memiliki rendemen beras kepala yang tinggi mencapai 96 persen dan 95 persen.

Kedua varietas ini memiliki rasa nasi yang pulen dengan kadar amilosa masing-masing 11 persen dan 12 persen. "Keunggulan-keunggulan khusus ini, menjadikan varietas IPB 12S dan IPB 13S ini potensial dan sangat cocok untuk target produksi dan pasar beras premium," ungkapnya.

Adapun varietas IPB 15S, dari hasil pengujian awal menunjukkan potensi kandungan Fe dan Zn yang cukup tinggi. Nutrisi Fe dan Zn merupakan mineral yang sangat membantu dalam mengatasi permasalahan anemia dan tengkes (stunting). "Varietas IPB 15S ini juga menunjukkan kemampuan produksi yang relatif baik pada kondisi kesuburan lahan sedang dan kurang," katanya seperti dikutip dari laman IPB.ac.id.

Kombinasi keunggulan potensi kandungan nutrisi mineral dan kemampuan adaptasi baik pada lahan kesuburan sedang dan rendah, menurut Prof. Hajrial, membuat varietas ini akan membantu petani yang tidak memiliki permodalan, baik dalam berusaha tani yang umumnya hasil panennya akan dikonsumsi oleh rumah tangganya sendiri.

Alternatif bagi Petani

Prof. Hajrial berharap, inovasi varietas IPB 12S, IPB 13S, IPB 14S, dan IPB 15S ini dapat menambah alternatif varietas padi yang dapat ditanam petani. "Ini juga menjadi sumbangsih IPB University di tengah upaya keras bangsa Indonesia saat ini dalam mengupayakan swasembada dan kedaulatan pangan nasional berkelanjutan," kata Prof Hajrial.

PT Botani Seed Indonesia, yang selama ini memproduksi dan menyebarluaskan benih varietas padi IPB University, merupakan mitra yang akan memproduksi dan menyebarluaskan varietas-varietas ini ke masyarakat.

Peluncuran varietas padi IPB di Kampus Dramaga, Bogor, Rabu (14/5) tersebut dihadiri, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, bersama Rektor IPB University, Prof. Arif Satria. Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini mengungkapkan, peluncuran tersebut sebagai tonggak penting dalam upaya modernisasi dan intensifikasi pertanian nasional.

"Saya hadir dalam acara peluncuran yang pertama, bibit padi dengan verietas IPB 13S, 14S, dan 15S yang selain rasanya lebih enak, tapi juga produktivitas per hektarnya, produktivitasnya tinggi, 11,6 sampai 12 ton per hektar, ini kan luar biasa ya," katanya. Dengan benih yang baik, Sudaryono berharap akan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.

Sementara itu, Rektor IPB University, Arif Satria mengatakan, IPB terus mengembangkan varietas padi untuk berbagai jenis lahan, termasuk sawah, lahan kering (padi gogo), dan lahan pasang surut. IPB bahkan telah merilis varietas IPB 9G khusus untuk lahan gogo yang juga bisa diterapkan di sawah dengan hasil maksimal.

"Kemudian kita juga ada varietas lahan pasang surut. Jadi kalau Pak Wamentan mencari benih untuk lahan tersebut, kita juga sudah ada, varietas untuk lahan tahan naungan juga sudah ada. Dan harapannya dengan potensi ini, IPB bisa memperbanyak dan memasarkan sehingga bisa dinikmati oleh publik dan oleh masyarakat Indonesia," ungkap dia. **Yul**

Tips Produktif **Bertani Organik Saat Peralihan**

Musim peralihan yang mengubah cuaca secara drastis, mulai dari kemarau menuju hujan atau sebaliknya, memang bisa menantang bagi petani organik. Namun, dengan penerapan teknik yang tepat, petani masih bisa menjaga produktivitas pertanian mereka.



Salah satu langkah pertama yang perlu diambil adalah pengelolaan tanah yang baik. Penggunaan mulsa organik, seperti jerami atau daun kering, bisa membantu menjaga kelembaban tanah dan mengatur suhu tanah agar tetap stabil meski terjadi perubahan cuaca yang mendadak. Selain itu, mulsa juga efektif dalam mencegah erosi tanah akibat hujan deras.

Mengelola kelembaban tanah dengan cermat menjadi hal yang sangat penting di musim peralihan. Petani dapat memanfaatkan teknologi sensor kelembaban tanah untuk memantau tingkat kelembaban secara akurat, sehingga bisa menyesuaikan intensitas penyiraman.

Dengan begitu, tanaman tidak kekurangan atau kelebihan air, yang bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Di sisi lain, sistem irigasi tetes menjadi pilihan yang sangat efisien, karena mampu mengatur distribusi air secara merata ke seluruh tanaman.

Selain itu, rotasi tanaman dengan penanaman tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan mencegah erosi.

Tak kalah penting, pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrem juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan panen. Untuk pengendalian hama dan penyakit, pemanfaatan biofungisida atau insektisida organik menjadi solusi yang ramah lingkungan.

Dengan langkah-langkah ini, meski cuaca tak menentu, pertanian organik tetap dapat produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya memastikan hasil yang optimal, tetapi juga mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan dan tahan terhadap perubahan iklim. **Nattasya/Gsh**

Tabloid Sinar Tani
PERTANIAN INDONESIA BARU

SINTA TV

PRICE LIST
BERLANGGANAN



SINAR TANI CETAK
RP. 16.000
Per Edisi
Minimum Pembelian
Rp 64.000/BLN
Rp 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER
Rp. 72.000/ Thn

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor Whatsapp : .....
Email : .....
Jabatan : .....
No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

CONTACT
081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV

Susuri Pulau Borneo, Mentan Yakin **Kalimantan jadi Lumbung Pangan**



Optimalisasi lahan menjadi salah satu program Kementerian Pertanian untuk mengejar swasembada pangan. Dari banyak daerah, wilayah Pulau Kalimantan menjadi sasaran untuk program tersebut. Untuk menggerakkan optimalisasi lahan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun berkunjung ke beberapa wilayah di Pulau Borneo tersebut.

Di Kalimantan Utara, Mentan Amran meninjau areal persawahan Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5). Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi daerah yang kini terus didorong bisa panen padi sebanyak tiga kali dalam setahun dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu menjadi tiga dan perbaikan sistem irigasi sebagai kunci utama.

"Target kita menaikkan IP dari satu menjadi dua terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memperbaiki irigasi yang sudah ada. Saya sudah berbicara langsung dengan Menteri PU," kata Amran.

Saat meninjau areal persawahan, Amran mengatakan, provinsi yang merupakan salah satu provinsi muda di Indonesia ini berpotensi besar menjadi sentra produksi padi berkat ketersediaan air sungai yang melimpah. Untuk itu, ia menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor untuk dapat segera mengurus percepatan pembangunan irigasi ke Jakarta agar irigasi Kaltara bisa diselesaikan tahun ini.

"Air sungai di sini sangat cukup, tapi sayangnya dibiarkan mengalir ke laut tanpa menjadi karbohidrat dan protein. Ini potensi besar yang harus dimanfaatkan. Kaltara seharusnya bisa jadi pemasok beras bagi daerah sekitarnya," kata Mentan.

Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan padi ladang (padi gogo) di wilayah Kaltara. Mengenai infrastruktur pendukung, Amran memastikan perbaikan jalan akan menjadi bagian dari program selanjutnya, terutama untuk memperlancar distribusi hasil pertanian. "Yang penting produksi dulu. Alhamdulillah, saat ini stok beras nasional tertinggi dalam sejarah, ini berkat arahan langsung dari Presiden," ujar Amran.

Amran menegaskan, masalah pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) telah tertangani sehingga fokus pemerintah saat ini beralih ke pembenahan irigasi. Bahkan sebagai bentuk perlindungan harga, pemerintah menetapkan harga gabah petani sebesar Rp 6.500/kg dan meminta Bulog menyerap hasil panen tanpa tawar-menawar.

"Pupuk, benih, alat mesin pertanian sudah aman. Sekarang tinggal irigasi. Ini semua bentuk perhatian Presiden kepada petani. Kita ingin petani bahagia dan sejahtera," kata Amran.

Amran juga mendorong percepatan tanam segera dilakukan di Kaltara dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian, yang diyakini dapat membuka peluang baru bagi peningkatan produksi. Melalui sinergi kuat antara pemerintah, petani, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat, Mentan optimistis kemandirian pangan di Kaltara dapat segera terwujud.

"Kita tidak bisa mengandalkan cara-cara konvensional. Alhamdulliah serapan Bulog selama 4 bulan tertinggi 57 tahun, stok kita juga tertinggi selama 57 tahun. Ini patut kita syukuri dan potensi besar Kaltara akan mendongkrak produksi pangan kita di masa mendatang,"tutup Amran

Lanjut ke Kaltim

Setelah dari Kalimantan Utara, perjalanan Mentan berlanjut ke Kalimantan Timur. Mentan melakukan Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam (LTT) dan Optimalisasi Lahan (Oplah) di Makodam VI Mulawarman Balikpapan, Kamis (8/5). Amran juga berkunjung ke Desa Gunung Mulia, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Pada kesempatan itu, Amran menargetkan Kalimantan Timur (Kaltim) bisa mencapai kemandirian pangan dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian Pertanian mendorong program percepatan swasembada pangan.

"Insya Allah kita target paling lambat satu dua tahun ke depan Kalimantan Timur tidak lagi mengambil beras dari tempat lain, tapi akan memberi beras ke tempat lain. Kami siapkan dukungan anggaran untuk mencapai swasembada pangan di Kalimantan Timur," kata Amran

Sebagai upaya mendukung swasembada pangan di Kalimantan Timur, Kementan akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program strategis, seperti optimalisasi lahan, cetak sawah, ketersediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi.

"Langkah-langkahnya adalah pertama oplah, kita harus percepat, cetak sawah kita percepat, pupuk kita amankan harus cukup, irigasi kita perbaiki, insya Allah kita akan menjaga swasembada di Kalimantan Timur," kata Amran.

Amran menekankan program-program yang dijalankan tidak akan mengganggu lahan hutan. Kegiatan Oplah dilakukan pada lahan sawah yang sudah ada dan ditingkatkan indeks pertanamannya. Sementara itu, program cetak sawah akan berfokus pada lahan tidur atau lahan tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai sawah.

"Yang namanya Oplah itu adalah sawah yang sudah ada, (sebelumnya) tanam 1 kali menjadi 3 kali, berarti tidak ada hubungannya hutan kan. Kedua, kita mencoba mencari lahan yang tidak produktif kita jadikan sawah. Jadi (lahan) tidak produktif kita jadikan sawah," jelasnya.

Amran menegaskan, pentingnya menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat besar, sehingga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kecukupan pangan nasional.

Meskipun demikian, Amran menyebut bahwa tekanan tersebut mampu mendorong Indonesia menjadi lebih tangguh. "Sekarang kita sudah buktikan justru dengan iklim ekstrem ini membuat kita cerdas, kuat, sehingga produksi meningkat. Sekarang stok (beras) kita tertinggi dalam 57 tahun," ungkapnya.

Untuk itu, Amran juga mengingatkan penggunaan teknologi modern dalam pertanian, termasuk pemanfaatan drone dan pelibatan generasi milenial dalam pengembangan sektor pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyampaikan harapan besar agar permasalahan pangan di Kaltim dapat diatasi. Hingga saat ini Kaltim masih bergantung pangan sebesar 30-50% dari wilayah lain, khususnya Pulau Sulawesi dan Pulau. Beberapa bahan pangan yang masih disuplai dari luar, yaitu beras, ayam, telur, sayur, dan buah-buahan.

"Kami antusias menyambut program swasembada pangan ini. Problem yang kami hadapi bukanlah ketersediaan lahan, tetapi skill, bibit, pupuk, teknologi, irigasi, dan kebutuhan pertanian lainnya. Kami siap bersinergi bersama pemerintah pusat untuk mewujudkan Kaltim swasembada pangan," tuturnya. **Yul**